

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntabilitas Kinerja, <http://www.menpan.go.id>. Diakses tanggal 29 April 2016 pk 22.56 wib
- Allen, Richard & Daniel Tommasi. 2001. *Managing Public Expenditure: Reference Book for Transition Countries*. Paris: SIGMA-OECD.
<http://www.oecd.org/puma/sigmaweb>
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Depdagri. (2009). *Sosialisasi Manual EKPPD TA 2008 Implementasi PP Nomor 6 Tahun 2008. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan EKPPD*. Pasuruan Jawa Timur.
- ISO 9000, www.wikipedia.com. Diakses tanggal 26 Desember 2015 pk 18.10 wib.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2009). *Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2007 Tingkat Nasional*.
- Kinerja, www.wikipedia.com. Diakses tanggal 26 Desember pk 15.20 wib.
- Kusnandar, dan Siswanto. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi 15*
- Mustikarini, dan Fitriyani. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi 15*
- Pengertian, Uji Hipotesis. <http://sro.web.id>. Diakses tanggal 28 Desember 2015 pk 23.54 wib.
- Pengujian Hipotesis, <http://carapandangku.blogspot.com>. Diakses tanggal 29 Desember 2015 pk 00.41 wib.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sanusi, A. 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan 2, Salemba Empat, Jakarta.

Sudarsana, dan Raharjo (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2013. *Simposium Nasional Akuntansi 16*.

Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.

Uji asumsi klasik, [/http://ksk3604240.blogspot](http://ksk3604240.blogspot). Diakses tanggal 28 November 2015 pk 23.23 wib.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah